UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tata Kelola Kolaboratif dalam Implementasi Kebijakan Satu Peta pada Geoportal Daerah Istimewa Yogyakarta
Mahmadah Aslichatur Rahmah, Prof. Dr. Ahmad Maryudi; Dr. Agus Joko Pitoyo, S.Si., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

INTISARI

Kebijakan Satu Peta (KSP) dirancang sebagai upaya mengatasi permasalahan ketidaksesuaian atau tumpang tindih pemanfaatan ruang dengan menerapkan tata kelola kolaboratif yang melibatkan berbagai stakeholders. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merespon kebijakan tersebut dengan menghadirkan Geoportal DIY sebuah aplikasi berbasis *website* untuk pengelolaan data geospasial dalam pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan data geospasial pada Geoportal DIY.

Penelitian ini menggunakan model tata kelola kolaboratif Ansell & Gash (2007) yang mendeskripsikan tahap *starting condition,* tahap *collaborative process* dengan *institutional design* dan *facilitative leadership,* serta *outcomes.* Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan mengumpulkan data primer dengan wawancara mendalam sedangkan data sekunder dilakukan dengan analisis terhadap Peraturan dan Keputusan Gubernur DIY terkait regulasi Forum Satu Data Pembangunan DIY.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif pada pelaksanaan Geoportal DIY menunjukkan kendala pada tahap *institutional design* karena belum melibatkan aktor non-negara, seperti swasta maupun akademisi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu dalam tahap pengumpulan data terkendala oleh terbatasnya pengelola data yang ahli dalam pengolahan data geospasial serta masih terbatas akses untuk umum dalam pemanfaatan data yang ada dalam Geoportal DIY. Perlu adanya pelibatan aktor non-negara untuk mengembangkan Geoportal DIY serta meningkatkan kebijakan agar tujuan penyelesaian tumpang tindih ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat diselesaikan.

Kata Kunci: *Tata Kelola Kolaborasi, Geoportal DIY, Kebijakan Satu Peta*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Tata Kelola Kolaboratif dalam Implementasi Kebijakan Satu Peta pada Geoportal Daerah Istimewa Yogyakarta
Mahmadah Aslichatur Rahmah, Prof. Dr. Ahmad Maryudi; Dr. Agus Joko Pitoyo, S.Si., M.A.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

ABSTRACT

The One Map Policy is designed to address discrepancies and spatial overlaps by implementing collaborative governance that involves a range of stakeholders. In response to these policies, the government of the Special Region of Yogyakarta Province (DIY) has developed the Special Region of Yogyakarta Geoportal, a website-based application for managing geospatial data in regional development. The aim of this research is to describe how collaborative governance operates within the Special Region of Yogyakarta Geoportal.

This research employed Ansell & Gash's (2007) collaborative governance model. The model describes the starting condition stage, the collaborative process stage, which involves institutional design and facilitative leadership, and outcomes. This research used a qualitative descriptive method, collecting primary data through in-depth interviews, while the secondary data were obtained through analysis of regulations and the Governor's Decrees of the Special Region of Yogyakarta regarding the One Data Development Forum policy.

The results show that the implementation of collaborative governance in the DIY Geoportal faced challenges in the institutional design stage, as it had not yet involved non-state actors, such as the private sector and academia, in the decision-making process. Moreover, the data collection stage is constrained by the limited number of data managers' expertise in geospatial data processing, as well as the still-restricted public access to utilize the data that is available in the DIY Geoportal. To strengthen the development of the DIY Geoportal and achieve its policy objectives, it is necessary to involve a non-state actor. This will help to tackle the issue, including the spatial overlaps (land use overlaps).

Keywords: *Collaborative Governance, DIY Geoportal, One Map Policy*